

## ANTROPOLOGI POLITIK RUANG LINGKUP DAN PENGEMBANGANNYA

Oleh : Sri Zul Chairiyah<sup>1</sup>

### Abstract

*Theoretically, the study about Political Anthropology in Indonesia has been done but not very often. It happened because no consensus among the Anthropologist. This article tries to discuss the development of Political Anthropology since the beginning that is done by structural-functional included in Indonesia that based on some traditional essays.*

*Pembahasan tentang Antropologi Politik di Indonesia secara teoritis masih jarang dilakukan. Kurangnya pembahasan tersebut karena belum adanya kesepakatan bersama di antara para ahli Antropologi itu sendiri tentang ruang lingkup kajiannya. Tulisan ini membahas perkembangan kajian antropologi politik dimulai dari kajian yang dilakukan oleh aliran Struktural-fungsional sampai sekarang, serta perkembangan kajian tersebut yang didasari oleh tulisan-tulisan tradisional di Indonesia.*

### A. Pendahuluan

Pembahasan tentang Antropologi Politik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas : (1) Ruang lingkup atau batasan yang menjadi "ruang sentuhan" antara disiplin Antropologi dan Ilmu Politik. Pengertian dasar mengenai ke dua disiplin ini akan memudahkan perumusan mengenai ruang lingkup Antropologi Politik. (2) Pendekatan-pendekatan Antropologi Politik. Melalui pemahaman atas kedua aspek ini, suatu kajian dapat secara subyektif menyatakan diri sebagai memakai pendekatan Antropologi Politik, atau se-

cara obyektif diklasifikasikan ke dalam subdisiplin ini.

Secara tersirat dari istilah yang dipergunakan yaitu Antropologi Politik, subdisiplin ini menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin Antropologi dengan Ilmu Politik. Ruang jembatan tersebut secara garis besar diisi dengan titik-titik persentuhan dalam teori, konsep maupun metodologi dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam hal teori dan konsep, hubungan tersebut dapat berupa "hubungan antara struktur dan masyarakat dengan struktur dan tebaran kekuasaan dalam masyarakat" tersebut. Jadi, da-

1. Staf pengajar di jurusan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

pat dikatakan bahwa jika Antropologi merupakan kajian atas struktur masyarakat dan pranata sosial, dan Ilmu Politik secara umum memfokuskan kajiannya dalam aspek kekuasaan, maka kajian Antropologi Politik berusaha menghubungkan kedua ilmu tersebut menjadi satu wilayah kajian.

Sampai dengan rumusan tersebut, bila disimak lagi maka ruang pembahasan selanjutnya tidak memiliki kesepakatan yang sama. Pembahasan dalam Antropologi Politik bisa berisi beraneka macam persoalan yang berkaitan dengan deskripsi dan analisa tentang sistem politik (struktur, proses, dan perwakilan) yang terdapat dalam masyarakat yang dianggap "primitif" atau arkaik. Bahkan lebih jauh lagi, dapat didefinisikan bahwa Antropologi Politik merupakan pendekatan-pendekatan Antropologi dalam mempelajari proses-proses dan struktur-struktur politik yang dilakukan melalui metode kajian kasus yang intensif maupun melalui kajian perbandingan lintas budaya. Namun dalam kajian-kajian Antropologi Politik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kajian yang terspesialisasi atau terfokus kepada politik sebagai sebuah satuan analisa yang berdiri sendiri. Kenyataan ini diperkuat oleh pernyataan dari seorang ahli politik yaitu David Easton, yang menyatakan bahwa Antropologi Politik sebenarnya tidak betul-betul ada, karena para ahlinya telah gagal untuk memperlihatkan batas-batas yang membedakan antara sistem politik dengan sistem-sistem yang ada dalam

masyarakat, atau antara pranata politik dengan pranata-pranata lainnya.

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kajian-kajian tentang persoalan politik dapat melalui pendekatan Antropologi. Contohnya, metode peserta pengamat (*participant-observer*) untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial "dari dalam" masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Para ahli Antropologi seperti Balandier, Balley, Cohen dan Southal, kemudian menjawab kritikan dari ahli Ilmu Politik tersebut. Mereka menyatakan bahwa tidak semua masyarakat manusia di dunia ini mempunyai negara atau sistem pemerintahan, dan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran kajian Antropologi biasanya mempunyai sistem-sistem politik dan tindakan-tindakan politik yang berpola yang tidak dapat dianalisa secara terpisah dari kekerabatan, agama, marga, sukubangsa atau unsur-unsur lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut.

Lebih lanjut menurut para ahli tersebut di atas bahwa dalam kehidupan yang nyata, melalui pranata-pranata yang bukan politik itulah kekuasaan dan kewenangan itu diungkapkan; khususnya dalam masyarakat-masyarakat yang tidak mengenal sistem pemerintahan. Bahkan sesungguhnya ungkapan-ungkapan politik dalam organisasi-organisasi yang tidak resmi, yang ada dalam masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan, nampak lebih menonjol dan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan politik yang resmi. Jadi analisa politik

sebagai satuan yang terpisah tidak dapat dilakukan dan tidak nampak dalam kajian-kajian Antropologi Politik, sehingga sampai dewasa ini tidak ada batas-batas yang jelas mengenai apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup Antropologi Politik, dan apa sesungguhnya kerangka dasar yang jelas dari Antropologi Politik. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kajian-kajian tentang persoalan politik dapat melalui pendekatan Antropologi. Contohnya, metode peserta pengamat (*participant-observer*) untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial "dari dalam" masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

Pengertian mengenai ruang lingkup dan wilayah kajian Antropologi seperti disebutkan di atas membawa dua konsekuensi yaitu : (1) Antropologi Politik dapat disebut sebagai subdisiplin dengan fokus kajian yang sempit karena hanya membahas aspek kekuasaan dan kaitannya dengan pranata sosial. (2) Justru sebaliknya wilayah kajiannya menjadi begitu luas karena sekaligus memperluas kemungkinan pembahasan dari semata-mata satu wilayah disiplin.

Bila dilihat dari ke dua kecenderungan di atas, maka yang berkembang dalam Antropologi Politik adalah kecenderungan yang kedua. Anggapan ini akan sangat jelas jika dilihat struktur penulisan (bab-bab) dari hampir seluruh buku teks mengenai subdisiplin ini. Tidak ada satupun dari buku-buku tersebut yang menyajikan struktur materi yang sa-

ma, terlebih pilihan akan topik kajiannya. Kenyataan demikian menyebabkan lingkup dan wilayah Antropologi Politik sekaligus dapat dikatakan luas dan tidak jelas batas-batasannya.

Dari lingkup dan wilayah Antropologi Politik serta metode yang diterapkan subdisiplin ini, maka muncul pertanyaan tentang apa kesejajaran dan tidak kesejajaran antara Ilmu Politik dengan Antropologi Politik, karena kedua-duanya membahas tentang kekuasaan dalam masyarakat. Kalau Ilmu Politik melakukan pemilihan kelembagaan bagi distribusi dan oleh kekuasaan, sedangkan Antropologi Politik tidak. Antropologi Politik menganggap hal ini sebagai sudah ada (sudah tercakup). Pembahasan dalam Ilmu Politik mulai dengan negara dan menguji bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, sedangkan Antropologi Politik beranjak dari titik pijak sebaliknya yaitu mulai dengan masyarakat dan menguji pengaruhnya terhadap negara (pemerintah).

## B. Kajian Antropologi Politik Struktural Fungsional

Sebagaimana dalam cabang Antropologi maupun Ilmu Politik, akar-akar Antropologi Politik sesungguhnya dapat ditelusuri jauh kebelakang, pada pemikiran sejumlah ahli Antropologi sejak pertengahan abad 19, di mana penelitian aspek-aspek politik dari kebudayaan baru ditangani secara sistematis. Nama-nama seperti L.H. Morgan, Frans

Boas, Malinowski, Robert Lowie, Oppenheimer, Sir Henry Maine, Balandier, Classen, Lucy Mair dan sebagainya; sudah meletakkan dasar-dasar dari apa yang kini disebut sebagai Antropologi Politik. Sekalipun ini bukan berarti bahwa mereka telah mempergunakan istilah 'Antropologi Politik' atau memetakan subdisiplin ini di dalam karya-karyanya. Dari sejumlah tokoh sebagai pemula yang mengembangkan ilmu ini adalah Evans-Pritchard, Fortes, Gluckman, Balandier, Claessen yang secara khusus dianggap memiliki sumbangan bagi peletakan dasar-dasar Antropologi Politik.

Antropologi Politik sendiri sebagai sebuah subdisiplin dari Antropologi Sosial atau etnografi -- mulai tersusun benang merah pendekatan, teori dan topik kajiannya -- sesungguhnya baru mulai menarik minat kalangan ahli Antropologi pada pertengahan tahun 1950-an ketika Evans-Pritchard, Redcliffe Brown, Frans Boas dan Malinowski mulai memelopori penerbitan sejumlah karyanya yang penting. Mereka bukan saja memperkenalkan subdisiplin ini, tetapi juga mengembangkannya dengan mengemukakan rumusan tentang pembahasan kajian hubungan antara "kekuasaan dan pranata sosial".

Malinowski, seorang ahli Antropologi Inggris, mengembangkan teori fungsionalisme biopsikologi. Dalam teori Malinowski ini ada seperangkat kebutuhan manusia dan kebutuhan akan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Ini diatur dan di-

arahkan melalui politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pranata-pranata yang ada dalam masyarakat tersebut. Pranata-pranata tersebut diperlakukan sebagai saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya dan secara bersama-sama merupakan sebuah kesatuan yang bulat dan menyeluruh. Konsep tentang kesatuan yang menyeluruh dan bulat ini dikenal ini dengan pendekatan *holistik* yang dikemudian hari dikembangkan dalam teori-teori *struktural fungsionalisme*.

Menurut struktural fungsionalisme, masyarakat terdiri atas struktur-struktur yang masing-masing berdiri sendiri tetapi saling berkaitan satu sama lainnya dalam hubungan fungsional; dan melalui hubungan fungsional ini struktur-struktur masing-masing maupun secara keseluruhan hidup dan berkembang. Radcliffe Brown (1940) misalnya, melihat bahwa sebuah masyarakat adalah sebuah sistem *equilibrium* yang masing-masing unsurnya berfungsi untuk menjamin terwujud dan hidupnya masyarakat itu secara keseluruhan.

Konsep tersebut di atas nampak dengan jelas dalam karya Fortes dan Evans-Pritchard, dalam bukunya *Africans Political Systems* (1940). Menurut Pritchard ada 2 tipe masyarakat Afrika yaitu yang tersentralisasi (telah mengenal pemerintahan) -- ada yang terwujud dalam bentuk negara dan ada yang terwujud dalam bentuk pemerintahan -- dan yang tidak tersentralisasi (yang be-

lum mengenal pemerintahan). Dalam masyarakat yang tersentralisasi, politik nampak lebih terpusat pada pranata-pranata kepemimpinan dan negara. Walaupun untuk itu dukungan-dukungan dari pranata-pranata lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut nampak kuat. Sedangkan dalam masyarakat yang tidak tersentralisasi, politik terwujud dalam berbagai pranata yang ada dalam masyarakat tersebut.

Pritchard dan Tait dalam bukunya "*Tribes without Rulers*" (1954), meneruskan penelitian Pritchard dan Brown untuk mengembangkan Antropologi Politik dengan menggunakan teori struktural fungsional. Buku ini sebagai kelanjutan dari bukunya "*African Political Systems*", mengupas tentang sejumlah sistem segmenter di Afrika. Middleton dan Tait mengemukakan bahwa masih banyak jenis-jenis sistem politik lain yang tidak berpusat di Afrika, dimana penelitiannya itu di batasi pada *lineage segmenter*, dan dalam hal ini ciri yang dianggap penting adalah oposisi segmenter. Lineage itu bersifat korporatif yang mempunyai kepentingan tertentu secara mantap, yang memberi sesuatu sifat permanen kepada kelompoknya. Di samping itu ada kelestarian kelompok yang terlepas dari oknum-oknum yang menjadi anggotanya, ada hak dan kewajiban yang menyertai keanggotaannya dan terhadap pihak ketiga kelompok dapat diwakili oleh salah seorang anggotanya. Kelompok itu dapat berarti sebuah badan hukum. Hasil pene-

litian Middleton dan Tait bahwa lineage itu merupakan sebuah korporatif masih dipertentangkan oleh kalangan para ahli, terutama tentang pengertian korporatif itu sendiri. Middleton dan Tait kemudian berusaha untuk memperbaiki dan menambah ketelitian taksonomi (klasifikasi) yang ada, dengan cara di mana sistem-sistem yang bersangkutan harus terus menerus dipelihara secara lebih mendalam. Dengan demikian studi-studi tersebut akan menambah pengertian korporatif yang terdapat dalam *lineage segmenter*.

Selain Radcliffe Brown, Evans Pritchard dan Middleton & Tait yang mengembangkan dan meletakkan dasar Antropologi Politik dengan menggunakan teori struktural fungsionalis juga ditemui nama Schapera (1956) dengan karyanya "*Government and Politics in Tribal Societies*". Buku ini mencoba membandingkan antara sejumlah sistem politik di Afrika Selatan. Penelitiannya ini menghasilkan beberapa pandangan penting antara lain : (1) Menganggap penting untuk mendefinisikan politik berdasarkan fungsi yang dimilikinya. Schapera kemudian mendefinisikan fungsi organisasi politik sebagai penanaman dan pemeliharaan kerjasama dalam kelompok dan kemerdekaan keluar. Untuk itu maka dalam sistem politik, Schapera memasukkan semua perwujudan kepemimpinan yang dapat dikategorikan sebagai kerangka kerjasama kelompok. (2) Perkembangan-perkembangan tertentu dalam or-

ganisasi politik itu baru dapat terjadi kalau ketepatangunaan ekonomi bertambah besar. (3) Arti teritorial untuk semua kelompok manusia. Dalam hal ini Schapera dengan jelas menggambarkan sistem politik di negara Afrika Selatan terutama hubungan antara organisasi politik dengan ekonomi.

Hasil penelitian Schapera ini kemudian dilanjutkan oleh Lucy Mair dalam bukunya *Primitive Government* (1962), yang menganalisa sejumlah sistem politik di Afrika Timur mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks. Dalam pandangan Mair, "politik pada hakekatnya dimulai ketika kekerabatan berhenti", walaupun Mair sendiri mengakui bahwa hal ini tidak selalu dapat ditetapkan dengan mudah. Ini berarti bahwa setiap masyarakat (yang lebih besar dari kelompok kerabat) mempunyai politik. Jadi menurut Mair, yang utama adalah fungsi-fungsi dari organisasi atau pemerintah tersebut. Selanjutnya ia menguraikan sistem-sistem politik bangsa-bangsa dari suku bangsa Nuer, dengan tekanan utamanya untuk menyelidiki bagaimana pemerintahan itu berfungsi, dan dengan syarat-syarat bagaimana sistem politik tersebut menimbulkan bentuk-bentuk dengan struktur-struktur yang lebih rumit. Berkaitan dengan hal tersebut, di samping perlu juga melihat mata pencaharian, juga perlu dijelaskan pengaruh sistem kekerabatan, terutama ditekannya kepada aspek sakral kepemimpinan. Setelah menjelaskan secara mendalam tentang fungsi dan struktur sistem poli-

tik terhadap kerajaan-kerajaan yang sakral tersebut di atas, Mair juga menjelaskan adanya bentrokan antara sistem tradisional dengan sistem di zaman modern.

Buku terakhir yang mengembangkan Antropologi Politik yang dianggap termasuk aliran Struktural Fungsional ialah karya Claessen van Vorsten En Volken tentang "Raja dan Bangsa" (1970). Claessen dengan buku ini berusaha untuk menentukan ciri-ciri kerajaan sakral yaitu kerajaan-kerajaan dari bermacam-macam daerah kebudayaan Tahiti dan Tonga di Polinesia, Dahomey dan Buganda di Afrika, serta Kerajaan Inca di Amerika. Dari setiap negara yang diteliti diberikan garis besar organisasi politik dan bagaimana organisasi itu berfungsi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ada persamaan-persamaan ciri di beberapa daerah yang ditelitinya, terutama aspek-aspek yang berhubungan dengan kedudukan rakyatnya, beserta hak dan kewajibannya. Di samping adanya persamaan, terdapat juga perbedaan dimana aspek-aspek tertentu hanya terdapat di Afrika atau di Polinesia.

### C. Kajian Antropologi Politik Setelah Struktural Fungsional

**K**onsep-konsep yang dikembangkan struktural-fungsional tersebut di atas kemudian mempengaruhi kajian Antropologi Politik selanjutnya yang menekankan pada pendekatan proses. Dalam pendekatan ini, proses-proses politik yang

berlaku dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Pendekatan proses ini mulai digunakan oleh Swartz, Turner dan Tuden (1956), yang melihat politik sebagai usaha untuk menguasai kedudukan penentu dan pelaksana tujuan-tujuan umum masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan oleh Bailey (1969) yang melihat politik sebagai kajian mengenai kompetisi untuk kekuatan (kekuasaan), dan cara bagaimana tujuan umum masyarakat itu dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai kekuatan. Melalui pendekatan ini dikembangkan konsep-konsep operasional dalam kajian Antropologi Politik, yaitu lapangan dan arena, kekuasaan, keabsahan, paksaan, dukungan dari para pengikut dan publik.

Kajian-kajian selanjutnya ditulis oleh M.G. Smith dalam sebuah artikelnya yang terkenal tentang *Lineage Segments*. Dalam artikel ini, Smith berusaha merubah konsep yang dikemukakan Evans Pritchard, Radcliffe Brown dan Fortes tentang prinsip pemerintahan dan politik menjadi konsep *government* (pemerintahan) yaitu proses yang membimbing dan mengatur kepentingan umum sesuatu bangsa atau kelompok. Jadi menurut Smith *government* adalah suatu proses sedangkan pemerintah adalah suatu struktur.

Dalam pengertian *government* ini, Smith mengemukakan dua komponen yaitu politik dan pemerintahan. Komponen politik meliputi kegiatan-kegiatan yang berusaha mem-

pengaruhi pemerintahan yang berasal dari perorangan maupun kelompok, serta usaha untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, dilaksanakan dan diatur oleh pemerintahan. Jadi di sini, komponen politik dilihat dalam rangka kekuatan. Sedangkan komponen pemerintahan harus dilihat dalam rangka kekuasaan dan hirarki. Dengan demikian pemerintahan adalah kombinasi antara kekuatan dan kekuasaan, dimana kekuasaan dipandang sebagai hak untuk memerintahkan kegiatan tertentu, sedangkan kekuatan sebagai kemampuan untuk memaksa orang lain untuk menaatinya.

Dari artikel Smith ini, terbukti bahwa politik dan pemerintahan sebenarnya adalah masalah tindakan, sehingga tekanan telah bergeser dari struktur dan organisasi ke proses. Ini merupakan suatu perkembangan yang penting, sehingga artikel ini dianggap sebagai langkah maju dalam perkembangan Antropologi Politik. Meskipun demikian, harus diadakan beberapa catatan mengenai ulasannya. Smith berpendirian bahwa sistem politik yang bersegmentasi tidak hanya ada dalam masyarakat yang tidak mempunyai pemerintahan pusat, tetapi ada pada semua jenis masyarakat yang tidak ada pemerintahan maupun yang ada pemerintahan pusat. Disini sistem politik kesatuan tidak perlu berlawanan dengan sistem politik yang bersegmentasi, kedua-duanya dapat berfungsi sendiri-sendiri, saling mengisi, dan tunjang menunjang. Pendapat Smith ini memungkinkan apabila kita memandang sistem politik

sebagai satu aspek saja dari kehidupan sosial dalam masyarakat, yaitu aspek yang menyangkut pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu didefinisikan sebagai badan pusat yang mengatur dan mengelola urusan-urusan umum dan resmi dari setiap satuan sosial.

Peter Lloyd, dalam kajiannya tentang struktur politik kerajaan-kerajaan Afrika mengemukakan bahwa, untuk memahami pemerintahan negara-negara tekannya tidak lagi pada organisasi pemerintahan akan tetapi pada proses kebijaksanaan atau pengambilan keputusan yang bersumber dari pemerintahan tersebut. Karena politik dibuat oleh elit politik yang ditentukan oleh pertentangan kepentingan diantara kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat, maka Lloyd berpendapat bahwa ahli Antropologi Politik harus memfokuskan perhatiannya kepada masalah-masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana cara mengemukakan kepentingan kelompok. (2) Bagaimana cara memilih anggota elit politik. (3). Bagaimana hubungan elit politik dengan elit massa.

Melalui pendekatan bermacam-macam itu, maka dapat dikatakan bahwa politik itu bukan struktur, tetapi merupakan suatu proses. Menurut para ahli tersebut di atas, politik adalah proses-proses yang terlibat dalam menentukan pelaksanaan dari tujuan yang ingin dicapai oleh umum (publik) dan bagaimana pelaksanaan dari tujuan tersebut, serta penggunaan dari kekuasaan untuk mencapainya, yang dilakukan

oleh anggota-anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya tersebut. Artinya, politik dapat didefinisikan sebagai persaingan kekuasaan dan cara-cara untuk mencapai dan menggunakan kekuasaan. Adam (1973) sebagai pendukung pendekatan proses yang lebih baru, memperlihatkan bahwa kekuatan atau kekuasaan itu dapat diperlakukan sebagai kekuatan yang bebas, seperti : pengetahuan, keahlian, dan karisma pribadi seseorang. Kekuatan yang bebas itu ada dan muncul dalam proses-proses yang berlaku dalam struktur-struktur yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan-pendekatan yang terbaru, yang dewasa ini banyak digunakan dalam kajian Antropologi Politik lebih menekankan pada melihat kemampuan individu sebagai pelaku politik atau respon-respon politik individual terhadap lingkungannya. Pendekatan ini merupakan reaksi terhadap pendekatan struktural fungsional, yang nampaknya menekankan pada struktur dan fungsi dalam sistem-sistem, sehingga pelaku-pelaku politik hanya nampak terlihat seperti otomatis-otomatis yang tidak mempunyai kemampuan dalam memilih alternatif-alternatif yang tersedia dalam lingkungan yang mereka hadapi.

Dalam kategori ini tercakup pendekatan-pendekatan yang menekankan kemampuan manipulatif individual (Barth, 1959; Cohen, 1974); teori tindakan yang dikembangkan oleh Bailey (1969) dan Gluckman (1960); Segmentasi atau



faksi politik (Nicholas, 1965); Simbolisme (Cohen, 1969); kesukubangsaan (Cohen, 1969). Kajian-kajian Antropologi Politik ini tidak membatasi ruang lingkup sasaran kajiannya dan cenderung menekankan pada pentingnya pemahaman hakekat manusia sebagai manusia politik.

Antropologi Politik dalam perjalanannya, meminjam konsep-konsep yang berasal dari disiplin ilmu pengetahuan lainnya terutama dari ilmu politik dan Ilmu Sosiologi Politik. Banyak konsep-konsep pinjaman yang kemudian menjadi bagian dari konsep-konsep Antropologi Politik seperti modernisasi, pembangunan, elite, kemajemukan, segmentasi dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa perhatian-perhatian utama dalam kajian Antropologi Politik adalah mencakup beberapa bidang, yang sebenarnya merupakan hasil pengkhususan dari sejarah perkembangan Antropologi Politik.

Bidang kajian Antropologi Politik ini dapat dilihat dalam kaitannya satu dengan yang lainnya maupun sebagai satuan perhatian yang masing-masing berdiri sendiri. Adapun bidang-bidang kajian itu antara lain : (1) Klasifikasi Sistem-sistem Politik. (2) Evolusi atau perkembangan secara bertahap dari sistem-sistem politik. (3) Struktur dan fungsi dari sistem-sistem politik. (4) Proses-proses politik dari masyarakat-masyarakat yang belum mengenal industri dan masyarakat dalam negara-negara yang sedang berkembang. Termasuk juga bidang perhatian terhadap tindakan indivi-

dual yang penuh dengan strategi manipulatif untuk pencapaian tujuan politik. Begitu juga proses-proses perubahan dan tradisi kebudayaan yang diakibatkan oleh modernisasi, yang khususnya berkaitan dengan pengadopsian sistem-sistem dan pranata-pranata politik yang berasal dari negara industri, menjadi sasaran kajiannya.

#### D. Kesimpulan

Dari perkembangan Antropologi Politik yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perkembangan Antropologi Politik untuk tahun-tahun mendatang mungkin sesuai dengan arah yang mendorongnya, yaitu lebih menekankan keanekaragaman pendekatan dan teori yang dapat dikembangkan. Kajian-kajian Antropologi Politik akhirnya juga mencakup kajian-kajian mengenai struktur-struktur formal dalam masyarakat modern, termasuk kajian mengenai birokrasi dan korporasi modern. Disamping itu juga dilakukannya hubungan antar disiplin-disiplin ilmu sosial yang relevan dengan saling pinjam meminjam konsep dan teori yang kemudian dikembangkan.

Pada akhirnya perkembangan Antropologi Politik di Indonesia akan sangat ditentukan tidak hanya oleh perkembangan subdisiplin ini di pusat-pusat akademik di luar negeri saja, tetapi juga oleh perkembangan faktor-faktor struktural di Indonesia. Pengembangan tersebut misalnya, lewat Satuan Ajaran Perkuliahan (SAP) dalam kurikulum Fakultas Il-

mu Sosial dan Ilmu Politik di universitas-universitas dan juga lewat tulisan-tulisan oleh orang Indonesia mengenai kajian-kajian dalam Antropologi Politik. Dalam hal ini sebenarnya ada tulisan tentang masalah-masalah tentang kepemimpinan mengenai pemerintahan, dan kekuasaan untuk dapat dipelajari dari karya-karya para ahli terutama hukum adat Indonesia dan dalam buku-buku Indonesia tentang raja, tugas dan kewajibannya, sifat-sifatnya yang baik dan adil dan sebagainya. Dalam kesusastraan Jawa misalnya, ada buku-buku kuno seperti *'Niti Praja'* (suatu buku Jawa dalam irama syair *'macapat'*, mengenai tingkahlaku yang baik dari seorang pegawai kerajaan. Di samping itu juga ada *'Koja Jajahan'* suatu buku Jawa, juga dalam irama syair *'macapat'* mengenai ajaran-ajaran mengatur dan memimpin kerajaan, serta bagian dari syair *'Serat Rama'* (Ramayana) yang disebut *'Astabrata'*. Dalam kesusastraan Bugis juga bisa kita temukan buku *'Latowa'*.

Dalam buku-buku kuno tersebut diajarkan tidak hanya mengenai kepemimpinan raja yang adil dan murah hati, yang menjaga keamanan dan ketentraman negara, tetapi juga masalah sumber dan cara-cara raja memelihara kekuasaannya, hubungannya dengan rakyat dan sebagainya. Barangkali dengan penelusuran tulisan-tulisan ini terutama yang berasal dari para ahli Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang perkem-

bangsan Antropologi Politik secara maksimal di Indonesia.

Akhirnya, apabila diperhatikan masalah-masalah yang kini menjadi perhatian dari Antropologi Politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sudah tentu perlu adanya suatu kerja sama yang lebih erat antara para ahli Antropologi dan para ahli ilmu Politik. Suatu kerja sama seperti itu memang sudah sering dianjurkan, karena ada pendirian bahwa, dalam semua sistem politik baik yang modern maupun yang tradisional, memiliki beberapa azas yang sama, yaitu upaya mencari kekuasaan dengan cara-cara yang rasional maupun dengan cara-cara yang tidak rasional. Cara-cara yang rasional didasarkan pada kemampuan untuk kekuatan politik yang satu dengan yang lain, ketrampilan berdiplomasi dan sebagainya. Cara-cara yang tidak rasional lebih banyak dilakukan dengan menguasai lawan politik melalui pendekatan psikologi, penguasaan sikap, pandangan, kepercayaan dan sebagainya. Cara-cara ini juga banyak dipergunakan dalam sistem politik yang modern.

Sebagai acuan bagi penelitian Antropologi Politik masa mendatang, beberapa pilihan tema berikut ini dapat dimanfaatkan. Antara lain politik ditingkat lokal, yaitu : (1) Bagaimana fungsi dan jalannya politik itu pada tingkat gejala antar manusia. (2) Bagaimana terbentuknya kelompok-kelompok dan partai-partai dari sekumpulan manusia. (3) Bagaimana lahirnya pemimpin. (4) Bagaimana hubungan yang terjadi di dalam "gerombolan" dan klik. (5)

Bagaimana bentuk dan pengaruh komposisi golongan penduduk di suatu daerah atau kota tertentu, terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat; (6) Bagaimana sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu suku bangsa tertentu yang memudahkannya untuk

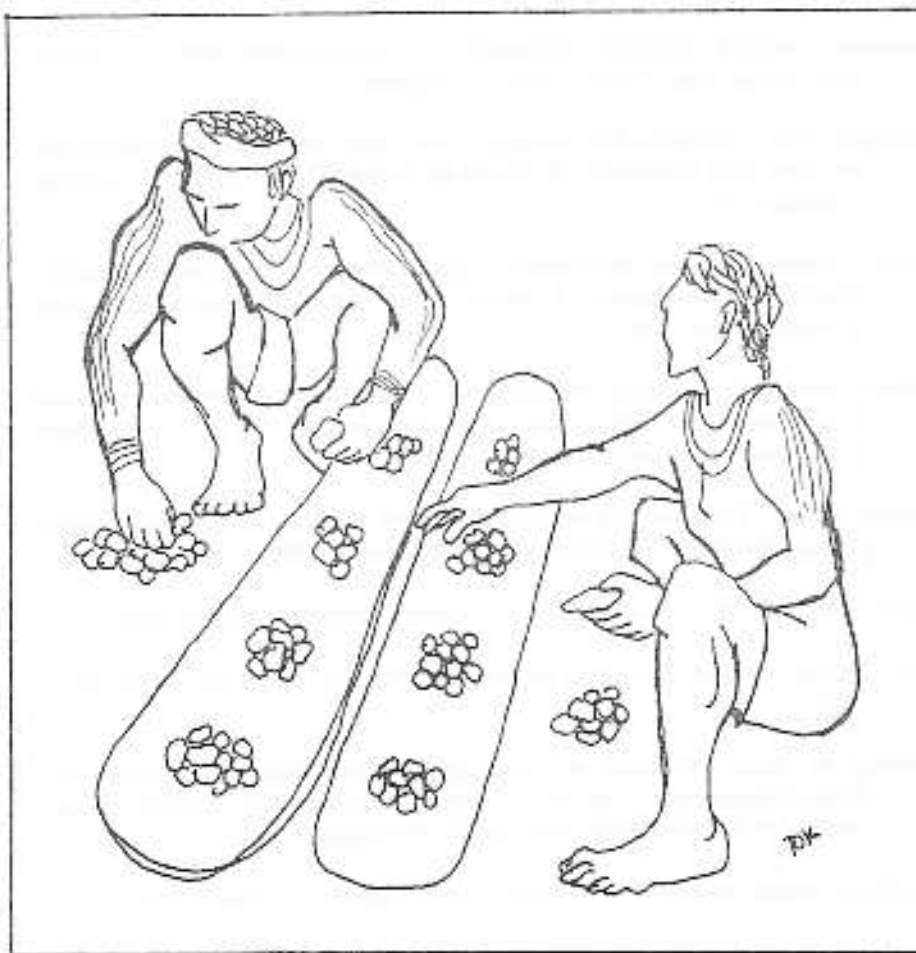
berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan modern. Dan masih banyak lagi tema-tema penelitian yang dapat dikerjakan dalam rangka pengembangan Antropologi Politik dimasa mendatang.

#### E. BAHAN BACAAN

- Balandier, George, "Political Anthropology" diterjemahkan oleh Y. Budisantoso *Antropologi Politik*, Jakarta: Radjawali, 1966.
- Claessen HJM, "Politieke Antropologie, Een Terreinverkenning", diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo, *Antropologi Politik, Suatu Orientasi*, Jakarta: Erlangga, 1974.
- Cohen, Ronald dan John Middleton (Eds), *Comparative Political Systems : Studies in The Politics of Pre-industrial Societies*, Austin: University of Texas Press, 1967.
- Colson, Elizabeth, "Political Anthropology, The Field", dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol.12, Ed.D.L Shills, New York : Macmillan and free Press, 1968.
- Easton, David, "Political Anthropology", dalam *Biennial Review of Anthropology*, Stanford: Standford University Press, 1958.
- Evans Pritchard, EE, *The Nuer*, Oxford : Oxford University Press, 1960.
- Fried, Morton H, *The Evolution of Political Society*, New York : Random, 1967.
- Keesing, M, Roger, "Cultural Anthropology, A Contemporary Perspective", diterjemahkan oleh Samuel Gunawan, *Antropology Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Jakarta : PT Erlangga, 1989.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta : UI Press, 1990.
- Seaton, S Lee dan HJM Claessen (Eds), *Political Anthropology. The State of The Art*, The Hague : Mouton, 1979.

Suparlan, Parsudi, "Antropologi Politik : Pendekatan dan Ruang Lingkup" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Jilid 5, Jakarta : AIPi, LIPI, dan Gramedia, 1988.

Swartz, Marc, Victor Turner dan Arthur Tuden (Eds), *Political Anthropology*, Chicago : Aldine, 1956.



ORANG MENTAWAI MEMBAGI HASIL BURUAN UNTUK MAKAN BERSAMA